

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 12 September 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Disetujui 7 Raperda Menjadi Perda

Masing-masing Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Pengarusutamaan Gender; Penyelenggaraan Perparkiran; Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Serta Anti Korupsi; Penyelengga-

raan Perizinan Berusaha; Bangunan Gedung; dan Pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketenagalistrikan.

Dia mengatakan, Raperda yang telah dibahas bersama antara Pemda dan DPRD tersebut dilakukan

harmonisasi, pembulatan, peman-tapan konsepsi, dan fasilitasi. Di antaranya kepada Kemenkum dan HAM, Pemprov Jateng, dan Gubernur Jateng.

"Raperda BUMDes akan memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan BUMDes yang dalam pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan," katanya.

Raperda Pengarusutamaan Gender ditujukan agar sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan ke-

wajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah. Disetujui juga Raperda untuk menguatkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan semangat antikorupsi.

"Perda penyelenggaraan per-parkiran akan mengatur perparkiran di Purbalingga, karena perkembangan keadaan laju pertumbuhan kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Hal itu telah berimplikasi terhadap adanya kebutuhan akan kawasan parkir yang memadai, sehingga pengaturan tentang perparkiran sangat diperlukan un-

tuk menunjang kenyamanan, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas," katanya.

Selaras

Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diharapkan dapat berjalan cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sehingga meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah. Sementara Perda Penyelenggaraan Bangunan Gedung diharapkan akan menertibkan, baik secara administratif maupun secara teknis.

"Agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal yang

menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya, khususnya di Kabupaten Purbalingga," im-buhnya.

Selain menyetujui 7 Raperda menjadi Perda, rapat Paripurna DPRD kali ini juga dilaksanakan penyampaian Raperda tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Dalam Raperda tersebut, Pemkab Purbalingga mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 303,86 miliar atau lebih tinggi 0,96% dibanding APBD mumi 2023.(H82-49)